

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi mampu menggambarkan perekonomian sebuah wilayah atau negara dalam mendatangkan peningkatan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat di suatu periode. Meningkatnya kegiatan perekonomian terutama di dorong lewat pendanaan agar memberikan peningkatan terhadap kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan (Manulusi, 2021). Dalam melihat peningkatan pada perekonomian tersebut bisa menggunakan satu ukuran yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB harga konstan dipergunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau faktor harga tidak menjadi pengaruh bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dengan nilai PDRB ini diharapkan bisa menjadi perbandingan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah (Dahliah, 2021).

Menurut teori Adam Smith sistem pertumbuhan yang terjadi akan bersamaan serta memiliki hubungan yang berkaitan satu dengan yang lain. Munculnya peningkatan kinerja di satu sektor akan menjadi daya pikat terhadap peningkatan modal, peningkatan kemajuan teknologi, peningkatan spesialisasi, dan perluasan pasar (Boediono, 1982). Sumber daya alam menjadi hal paling dasar pada kegiatan ekonomi, sehingga diperlukan masyarakat yang produktif dalam mengelolanya. Spesialisasi diperlukan untuk meningkatkan keterampilan kerja serta mesin yang menghemat tenaga. Dengan terciptanya spesialisasi dapat menghasilkan produk dengan harga riil, dimana semakin istimewa sebuah produk akan dibutuhkan modal yang lebih. Akumulasi modal yang ada bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan modal ini akan menghasilkan surplus yang bisa dimanfaatkan untuk investasi agar terciptanya produk yang memiliki spesialisasi sehingga terdapat peningkatan modal. Proses ini terus berjalan dan mampu meningkatkan perekonomian (Butler, 2012).

Menurut Karl Marx dengan adanya peningkatan teknologi, peningkatan modal yang dilakukan pengusaha akan berfokus pada berkembangnya teknologi, sehingga terdapat pengalihan tenaga manusia ke tenaga mesin yang berujung pada

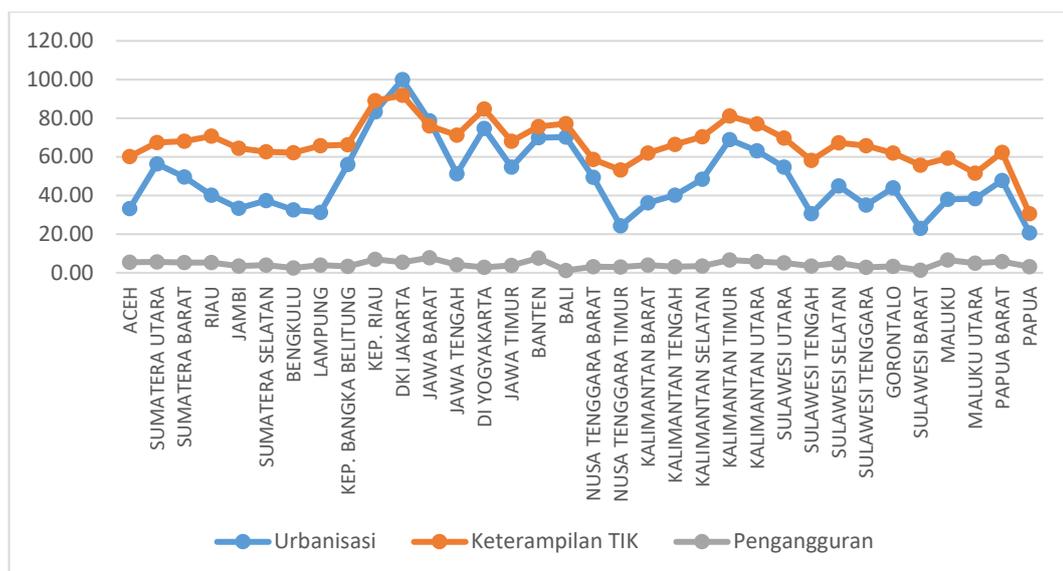
pengangguran. Akibatnya, muncul teori marxisme yang digagas oleh Karl Marx dimana semakin berkembangnya pembagian kerja dalam ekonomi melahirkan dua kelas yang berbeda seperti kaum borjuis (kaum yang menguasai modal) serta kaum proletar (kaum yang tidak mempunyai modal sehingga di eksploitasi oleh kaum borjuis). Kepemilikan modal menjadi jalan utama dalam memeras buruh, karena upah yang didapatkan oleh kaum borjuis akan sangat besar sedangkan kaum proletar beban kerjanya berat dan upahnya sedikit. Hal inilah yang menyebabkan munculnya kondisi sosial seperti pengangguran, urbanisasi, konflik, dan sebagainya. Dalam teori sosialisme seharusnya modal secara bersama-sama dimiliki dan diolah sehingga akan menghasilkan adil dan merata (Stepnisky, 2019).

Kondisi sosial dan ekonomi bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi karena mampu memberikan gambaran terkait kondisi perekonomian sebuah wilayah. Mengingat penting untuk menganalisis kondisi sosial ekonomi sebagai indikator dalam pertumbuhan. Menurut (Linton, 1984) kondisi sosial memiliki lima indikator yang meliputi umur dan kelamin, pekerjaan, status sosial, kelompok rumah tangga, serta keanggotaan pada kelompok perserikatan. Dalam hal ini kondisi sosial dijelaskan pada urbanisasi, keterampilan TIK, pengangguran, konflik, dan rasio ketersediaan tempat tidur rumah sakit. Menurut (Evers, 1991) kondisi ekonomi memberikan sebuah derajat yang dilihat secara rasional serta menempatkan seseorang terhadap suatu kedudukan di masyarakat. Dalam hal ini kondisi ekonomi yang akan dijelaskan seperti pengeluaran pemerintah, PDRB, investasi, pajak, dan total ekspor non migas (Barat, 2019).

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas 1,905 juta Km² yang terdiri dari 34 provinsi dengan jumlah penduduk 273,5 juta pada tahun 2020. Hal ini membuat Indonesia terus memberikan upaya terbaik agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai target yang diharapkan. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini menunjukkan angka 5,01 persen dan bisa dikatakan mulai cukup stabil pasca krisis ekonomi di masa pandemic. Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat dibandingkan negara lain di Asia Tenggara. Permasalahan sosial dan ekonomi yang ada bisa memberikan dampak yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi sehingga Pemerintah diharapkan mampu untuk mengelola perekonomian dengan baik.

Kondisi sosial dan ekonomi merupakan indikator yang menunjang *sustainable development goals* (SDGs) pada tujuan ke 3) Kehidupan sehat dan sejahtera; 4) Pendidikan berkualitas; 8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; 9) Industri, Inovasi, dan Infrasturktur; 11) Kota dan pemukiman yang berkelanjutan (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2022). Konsep keberlanjutan ini adalah konsep sederhana namun kompleks, sehingga pengertian keberlanjutan sangat multidimensi. Pemikiran yang paling terkemuka dan digunakan oleh banyak pihak mengusung tiga dimensi yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan (Fauzi A. , 2009). SDGs merupakan agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk rencana aksi secara global.

Kondisi sosial yang ingin digambarkan dalam penelitian ini dimulai dari urbanisasi, Urbanisasi memiliki manfaat bagi perkotaan seperti memenuhi permintaan tenaga kerja perkotaan karena pengembangan sektor industri. Kondisi sosial lainnya yaitu keterampilan teknologi memiliki banyak manfaat dalam berbagai bidang seperti memudahkan individu dalam bertukar informasi, memudahkan konsumen dalam menemukan barang atau jasa yang dibutuhkan dalam waktu cepat dengan harga yang terjangkau, dalam pendidikan memudahkan kegiatan belajar mengajar, memudahkan transaksi *e-banking* sehingga mampu untuk membuat rekening secara *online*.



Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2020)

Gambar 1. Grafik Persentase Urbanisasi, Keterampilan Teknologi, dan Pengangguran pada 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2020

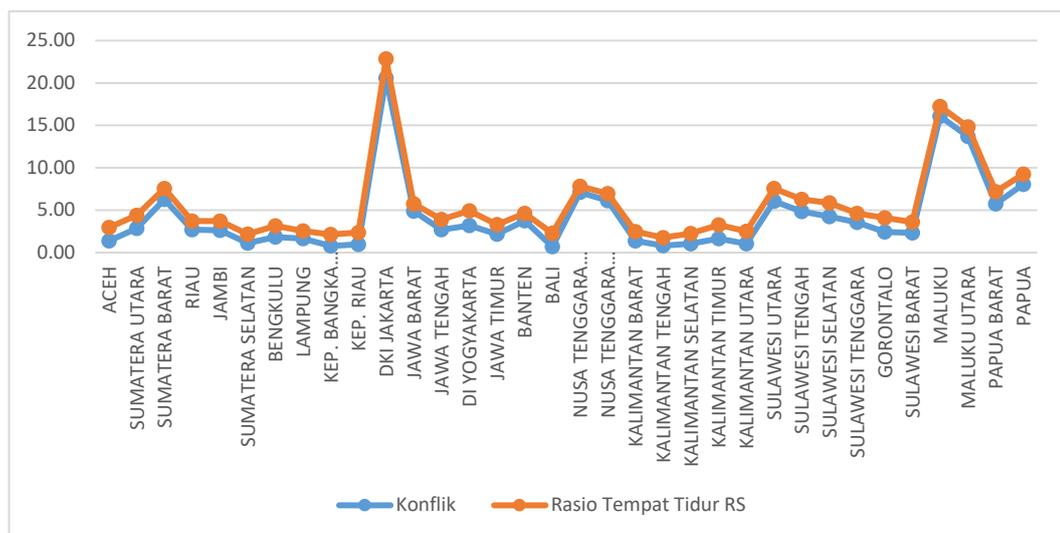
Berdasarkan gambar 1 memperlihatkan jika urbanisasi merupakan fenomena sosial yang memiliki nilai yang cukup tinggi, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat urbanisasi tertinggi di Indonesia mengingat Jakarta menjadi ibukota negara serta pusat perkantoran membuat Jakarta menjadi tujuan urbanisasi. Urbanisasi merupakan proses pembentukan kehidupan perkotaan yang beda dari kehidupan pedesaan dalam konteks ekonomi serta psikologi masyarakat (Soetomo, 2009). Mereka yang melakukan urbanisasi biasanya menginginkan pendapatan yang lebih baik dari tempat asalnya sebab tujuan awal ingin memperbaiki taraf hidup, namun apabila jumlahnya tidak mampu dikendalikan akan memberikan dampak negatif. Pertumbuhan kota terjadi sangat cepat pada negara berkembang, hal ini karena meningkatnya urbanisasi. Wilayah perkotaan saat ini terus berjuang keras dalam mengakomodasi penambahan populasi di berbagai kota besar. Urbanisasi yang terus meningkat akan menimbulkan permasalahan sosial sehingga menghambat perencanaan kota. Dalam hal ini tidak sejalan dengan tujuan SDGs ke 11 yaitu kota dan pemukiman yang berkelanjutan.

Kondisi sosial lainnya yaitu keterampilan teknologi informasi dan komunikasi pada kegiatan yang berkaitan dengan komputer dalam suatu periode tertentu (Badan Pusat Statistik, 2020). Jika bercermin pada keadaan saat ini TIK merupakan sebuah hal yang patut kita miliki, karena saat ini semua kegiatan berbasis *digital*. Keterampilan TIK merupakan *soft skill* yang wajib dimiliki pada usia produktif saat ini. Berdasarkan gambar 1 Provinsi Papua merupakan provinsi dengan tingkat penguasaan keterampilan TIK terendah di Indonesia dikarenakan akses internet yang masih belum meluas di wilayah Timur Indonesia. Berdasarkan tujuan SDGs ke 4 dan 9 yaitu pendidikan berkualitas dan industri, inovasi, dan infrastruktur maka Provinsi Papua belum bisa memenuhi target. Mengingat pendidikan dan akses internet ini sangat penting untuk memastikan kesetaraan akses pada informasi serta pengetahuan.

Pengangguran adalah kondisi sosial dalam indikator makro dan apabila pengangguran terlalu tinggi bisa memberikan pengaruh serius bagi pertumbuhan ekonomi. Provinsi Jawa Barat memiliki angka pengangguran tertinggi di Indonesia

karena besarnya jumlah pelajar yang lulus dan belum memperoleh pekerjaan sehingga harus menganggur terlebih dahulu, di sisi lain karena jumlah industri di Jawa Barat tinggi sehingga banyak menarik penduduk dari luar Jawa Barat untuk pindah ke provinsi ini yang menyebabkan kurangnya lapangan pekerjaan. Mengingat peluang pekerjaan yang layak akan memperkuat pertumbuhan ekonomi dan memberikan dorongan positif bagi perekonomian. Dapat diartikan jika Provinsi Jawa Barat belum bisa memenuhi target pada tujuan SDGs ke 8 yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Diperlukan adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dan para pengusaha untuk menekan angka pengangguran dengan cara menerima pekerja yang domisili berada di Jawa Barat terlebih dahulu agar pengangguran di Jawa Barat bisa menurun.

Terdapat kondisi sosial lainnya yaitu Rasio ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang tinggi menunjukkan jika pelayanan kesehatan di sebuah wilayah sudah semakin baik. Menurut *World Health Organization*, suatu negara idealnya memiliki lima tempat tidur rumah sakit untuk setiap 1.000 penduduk. Ini dilakukan sebagai antisipasi kemungkinan yang terjadi apabila terdapat lonjakan pasien. Kondisi sosial seperti konflik merupakan masalah kepentingan yang ingin dicapai baik oleh individu atau kelompok untuk memperoleh hal yang diinginkan bisa dengan ancaman ataupun kekerasan. Konflik yang semakin parah bisa mengarah kepada jatuhnya korban jiwa sehingga perlu ditangani di rumah sakit, maka rasio ketersediaan tempat tidur rumah sakit sangat penting.



Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2020)

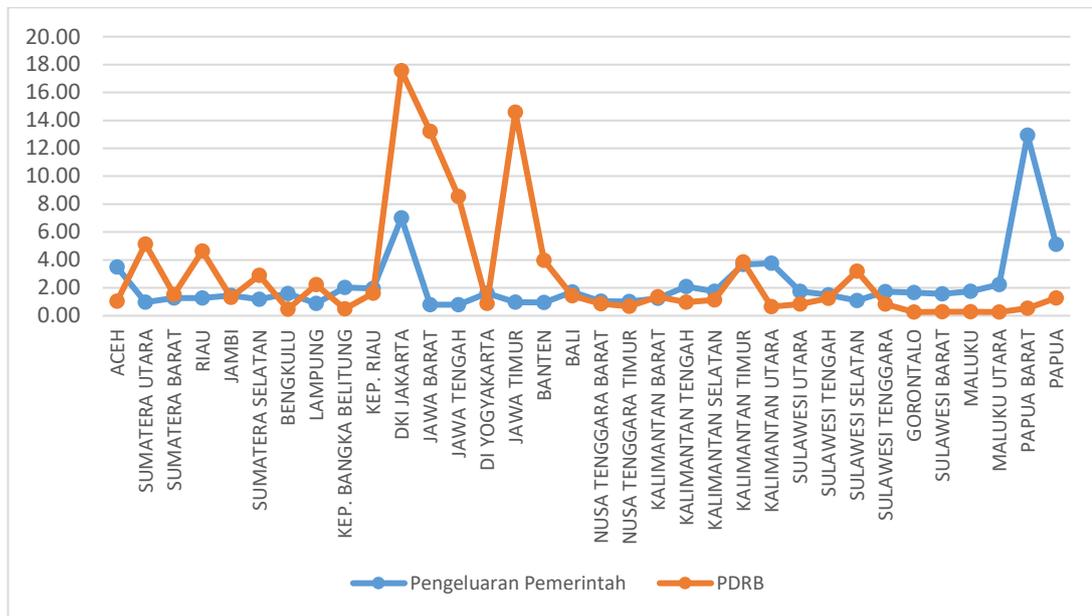
Gambar 2. Grafik Persentase Konflik dan Rasio Ketersediaan Tempat Tidur Rumah Sakit pada 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2020

Kondisi sosial selanjutnya adalah konflik, Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi dengan konflik tertinggi karena imbas dari tingginya urbanisasi. Konflik ini dikarenakan mereka sebagai pendatang memiliki latar belakang budaya yang berbeda, sehingga mudah terjadi benturan kepentingan antar individu maupun kelompok. Faktor lainnya karena toleransi yang rendah serta sikap *individualism* yang muncul di masyarakat. Ini mengartikan jika masyarakatnya tidak bisa hidup dengan sejahtera karena ketidakamanan tersebut, sehingga tidak sesuai dengan tujuan SDGs ke 3 yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Dibandingkan dengan Provinsi Bali merupakan provinsi dengan konflik yang rendah karena masyarakat sekitar masih menjunjung tinggi kearifan lokal yang berdasar pada nilai, norma, dan hukum yang diwariskan oleh para leluhurnya sehingga digunakan untuk memecahkan permasalahan masyarakat.

Sejalan dengan keadaan konflik yang tinggi di Provinsi DKI Jakarta, rasio ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang paling tinggi berada di Provinsi DKI Jakarta. Mengingat tingginya konflik bisa mengarah pada jatuhnya korban jiwa sehingga diperlukan fasilitas kesehatan yang memadai salah satunya tempat tidur pasien. Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi provinsi dengan rasio ketersediaan tempat tidur rumah sakit terendah, hal ini dapat diartikan jika wilayahnya belum bisa memenuhi target pada tujuan SDGs ke 3 yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Mengingat setiap masyarakat berhak untuk menerima akses kesehatan yang baik karena kesehatan menjadi prediktor awal dalam pertumbuhan ekonomi.

Kondisi ekonomi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah karena menjadi input bagi daerah tersebut, dalam hal ini pengeluaran pemerintah memiliki manfaat mengatur perekonomian dengan menetapkan besar kecilnya pendapatan serta pengeluaran pemerintah setiap tahun yang bisa di lihat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pengeluaran ini digunakan untuk membiayai berbagai sektor agar meningkatkan taraf hidup masyarakat, sehingga menggambarkan jika pemerintah berfokus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. PDRB menjadi indikator ekonomi yang merupakan

jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan dari semua sektor ekonomi di sebuah wilayah yang dijadikan sebagai ukuran pendapatan daerah per sektor ekonomi.



Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2020)

Gambar 3. Grafik Persentase Pengeluaran Pemerintah dan PDRB pada 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2020

Provinsi Papua Barat adalah provinsi dengan pengeluaran pemerintah tertinggi di Indonesia. Provinsi Papua Barat adalah provinsi paling ujung timur Indonesia sehingga masuk dalam provinsi tertinggal, sehingga pemerintah saat ini sedang menggenjot pembangunan untuk fokus dalam pengembangan berbagai fasilitas public. Pengeluaran pemerintah merupakan cara untuk meningkatkan pembangunan sebuah daerah. Dengan pengeluaran pemerintah mampu memperbaiki layanan public seperti sarana maupun prasarana. Perbaikan berbagai layanan menjadi investasi bagi sumber daya manusia agar mampu membentuk masyarakat yang produktif dan memberi dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi (Aprilany, 2022). Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Solow dimana pertumbuhan ekonomi berasal dari tiga faktor seperti meningkatnya kualitas serta kuantitas pekerja (*labor*), peningkatan modal (lewat tabungan serta investasi) dan peningkatan teknologi. Investasi fisik yaitu infrastuktur, dalam model Solow terdapat pula faktor kapital (Jhingan, 2018). Provinsi Jawa Barat adalah provinsi dengan pengeluaran pemerintah terendah di Indonesia. Sejalan dengan realisasi belanja pemerintah yang turun 8 persen dari tahun 2019 karena menurunnya pos

Nadira Abia Asha, 2022

ANALISIS KONDISI SOSIAL EKONOMI PADA 34 PROVINSI DI INDONESIA

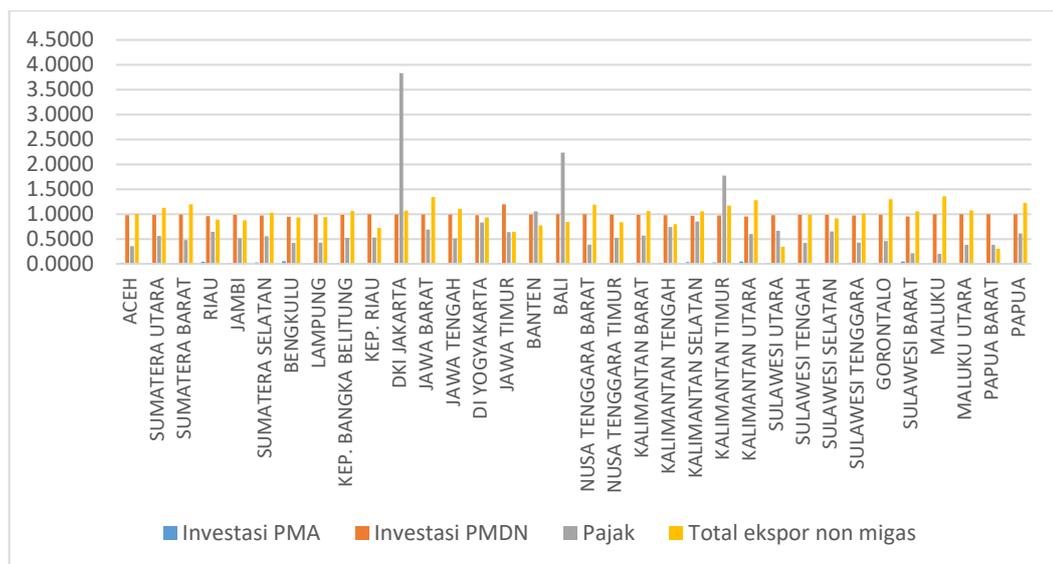
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

belanja modal. Aktivitas perekonomian yang sempat terhenti akibat pandemi berakibat pada bergesernya pelaksanaan proyek infrastruktur yang akan atau sedang dijalankan.

Ekonomi menjadi kapasitas pertumbuhan sehingga berdasarkan gambar 3 memperlihatkan jika proporsi PDRB atas dasar harga konstan tertinggi ditunjukkan oleh Provinsi DKI Jakarta. Mengingat struktur perekonomian di dominasi dari seluruh sektor perekonomian, kecuali sektor pertanian serta pertambangan-penggalan. Kondisi ini juga diperkuat dengan adanya tiga sektor utama penyokong PDRB DKI Jakarta seperti keuangan; *real estat*, jasa perusahaan; perdagangan, hotel, restoran; industri pengolahan. Semakin besar kuantitas serta semakin meningkatnya kualitas sumber daya, maka semakin besar juga potensi sebuah daerah untuk meningkatkan pertumbuhannya (Purba, 2021). Provinsi Gorontalo memiliki PDRB terendah di Indonesia, hal ini terlihat dari PDRB yang hanya tumbuh 3,78 persen dimana biasanya bisa tumbuh mencapai 6 persen.

Investasi yang meningkat akan memberikan dampak positif terhadap produksi barang dan jasa, kemudian berimbas pada meningkatnya konsumsi rumah tangga. Ekspor non migas memiliki manfaat dalam ekspansi pasar baru di luar negeri yang mampu meningkatkan perluasan pasar domestik, investasi serta devisa bagi negara. Pajak adalah iuran wajib kepada negara dari orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang.



Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2020)

Gambar 4. Grafik Persentase Investasi, Ekspor non Migas, dan Pajak pada 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2020

Berdasarkan gambar 4 Provinsi Jawa Timur adalah provinsi yang implementasi investasinya paling tinggi di Indonesia. Menurut riset *Asia Competitiveness Institute* pada tahun 2019 menunjukkan jika Jawa Timur menjadi peringkat pertama dalam hal kemudahan berbisnis di Indonesia. Tidak heran jika Jawa Timur menduduki peringkat teratas dalam realisasi investasi. Provinsi Papua Barat merupakan provinsi dengan realisasi yang rendah hal ini disebabkan birokrasi yang sulit, rendahnya penjaminan terhadap keamanan serta sulitnya memperoleh kepastian hak atas tanah. Diharapkan agar pemerintah daerah bisa terus melakukan berbagai inovasi agar layanan perizinan semakin dipermudah, karena investasi mampu meningkatkan modal yang dimiliki daerah.

Penerimaan terbesar pemerintah berasal dari pajak, tinggi rendahnya pajak akan memperlihatkan anggaran daerah untuk mengatur pengeluaran daerah, lewat pengelolaan pembangunan ataupun pembiayaan rutin (Simanjuntak, 2012). Berdasarkan gambar 4 Provinsi DKI Jakarta menjadi wilayah dengan pendapatan pajak tertinggi di Indonesia. Mengingat Provinsi DKI Jakarta menjadi pusat perekonomian nasional dimana perekonomiannya di dorong oleh berbagai sektor seperti jasa, properti, industri kreatif, perdagangan serta keuangan. Provinsi Maluku menjadi wilayah dengan pendapatan pajak terendah di Indonesia. Banyak siasat dilakukan pemerintah agar pendapatan sektor pajak mampu meningkat, tak terkecuali pemerintah daerah lewat beragam reformasi perpajakan daerah. Jika pendapatan pajak difokuskan untuk membiayai proyek yang produktif maka akan berpengaruh positif bagi daerah maupun negara (Saragih, 2018).

Ekspor non migas mempunyai nilai pasar yang tinggi disamping potensinya yang tidak akan habis dengan berjalannya waktu. Berdasarkan gambar 3 Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan tingkat ekspor non migas paling besar di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut. Pemerintah daerah perlu memberikan perhatian khusus dengan lebih gencar mensosialisasikan Surat Keterangan Asal (SKA) karena keuntungan yang di dapat bisa meringanan tariff di negara tujuan. Mengingat ekspor menambah nilai devisa suatu daerah yang akan mempengaruhi PDRB. Berdasarkan teori *Economic Base* oleh Douglas C. North mengemukakan

jika faktor penentu pertumbuhan ekonomi sebuah daerah berkesinambungan dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Mengingat kegiatan produksi di sebuah daerah akan memakai sumber daya produksi lokal, seperti tenaga kerja, bahan baku, serta produk yang di ekspor akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Huda, 2022). Provinsi Papua Barat merupakan provinsi dengan ekspor non migas paling rendah di Indonesia, hal ini karena pangsaanya didominasi oleh ekspor migas terutama gas.

Kondisi sosial dan ekonomi memiliki berbagai permasalahan yang timbul sehingga bukan hanya menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi tidak stabil tetapi juga memberikan imbas pada target SDGs tidak tercapai. Dalam SDGs yang di pilih meliputi tujuan 3) Kehidupan sehat dan sejahtera; 4) Pendidikan berkualitas; 8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; 9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur; serta 11) Kota dan pemukiman yang berkelanjutan.

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya seperti halnya yang disampaikan (Aswitari, 2017) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali yang membuktikan jika fasilitas kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. (Amanda, 2022) di Sumatera Barat yang membuktikan jika pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. (Hasliani, 2022) di Kota Tarakan juga membuktikan jika pengangguran berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. (Huda, 2022) di Provinsi Jawa Timur membuktikan jika ekspor non migas berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. (I Nyoman Gede Marta, 2022) di Kabupaten Tabanan membuktikan jika investasi berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi. (Tantowi, 2021) di DKI Jakarta membuktikan jika penerimaan pajak daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan perbedaan yang ada pada penelitian terdahulu serta latar belakang di atas, sehingga peneliti berminat untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Pada 34 Provinsi di Indonesia**”.

I.2. Perumusan Masalah

Pertumbuhan ekonomi memperlihatkan transisi pada perekonomian yang berkelanjutan dalam mencapai kedudukan yang lebih baik pada kurun waktu tertentu. Kondisi sosial dan kondisi ekonomi sangat mempengaruhi pertumbuhan

ekonomi sebuah wilayah. Kondisi sosial membuat pertumbuhan ekonomi menjadi tidak stabil, ada beberapa indikator yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti urbanisasi, keterampilan TIK, pengangguran, konflik, dan rasio ketersediaan tempat tidur rumah sakit. Kondisi ekonomi diharapkan bisa tumbuh positif dalam bentuk peningkatan pendapatan negara, terdapat beberapa indikator dalam kondisi ekonomi meliputi pengeluaran pemerintah, PDRB, investasi, pajak, dan total ekspor non migas.

Menurut Adam Smith pertumbuhan ekonomi berdasar terhadap sumber daya alam karena menjadi hal yang krusial dalam kegiatan masyarakat. Sumber daya alam bisa berkembang apabila sumber daya manusianya produktif, sehingga meningkatkan stok modal dan mampu memegang peranan dalam pertumbuhan output. Dalam hal ini spesialisasi pada pelaku ekonomi sangat penting agar dapat bekerja secara efisien dan menghasilkan produk dengan harga riil yang akan menciptakan keuntungan. Peningkatan modal serta investasi bergantung dari karakter masyarakat dalam menabung, karena kesanggupan ini akan ditentukan dari bagaimana seseorang mampu menguasai serta mengeksplor sumber daya yang tersedia. Karl Marx menjelaskan dengan adanya pembagian kerja akan menimbulkan dua kelas yang berbeda seperti borjuis dan proletar. Kaum proletar ini akan bersatu dan memberontak kepada kaum kapitalis akibat munculnya indikator sosial.

Peneliti ingin menganalisis dan melihat daerah mana yang pertumbuhan ekonomi masuk dalam kategori optimal dengan metode *qualitative comparative analysis* (QCA). *Qualitative Comparative Analysis* (QCA) merupakan pendekatan yang bisa dilakukan dengan analisis kombinasi yang kompleks antarfaktor yang berdampak pada *outcome* kebijakan. QCA memiliki peran krusial dalam evaluasi kebijakan dimana peneliti memungkinkan untuk melaksanakan perbandingan sistematis antarkebijakan, baik antarwilayah, sektor, atau program dan melakukan rancang bangun *quasi-experiment* dengan melakukan uji coba kombinasi faktor. Prinsip dari metode ini adalah metode perbandingan sistematis antarkasus yang ditujukan dalam memahami kondisi kualitatif apa yang mempengaruhi *outcome* (Fauzi A. , 2019).

I.3. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai untuk menganalisis dan mengetahui kondisi sosial ekonomi masing-masing wilayah di 34 Provinsi di Indonesia sebagai input dari pertumbuhan ekonomi.

I.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan wawasan serta pengetahuan bagi peneliti serta bisa dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya perihal pengaruh kondisi sosial ekonomi pada 34 Provinsi di Indonesia dengan metode *qualitative comparative analysis*.

b. Manfaat Praktis

1). Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan, evaluasi ataupun gambaran untuk pemerintah daerah terkait implementasi dalam mengambil langkah yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi.

2). Bagi Peneliti dan Masyarakat

Sebagai bentuk rujukan untuk peneliti selanjutnya yang hendak melaksanakan penelitian sejenis serta memotivasi mahasiswa agar bisa berpikir kritis terhadap kondisi pertumbuhan ekonomi di 34 Provinsi di Indonesia. Diharapkan masyarakat terdorong untuk mengikuti berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah.